

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017



Dinas  
**pmptsp**  
Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Jabar



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2017.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun pertama dalam masa Renstra Dinas PMPTSP Tahun 2017-2018. LKIP Tahun 2017 disusun berdasarkan Renja Tahun 2017 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra Tahun 2017-2018).

LKIP Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat disusun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKIP Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas PMPTSP. Komitmen dalam penyusunan LKIP Dinas PMPTSP, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas PMPTSP untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKIP Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 terdiri atas: Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja serta Penutup. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti latar belakang, maksud dan tujuan, serta isu strategis. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menyajikan tentang perencanaan kinerja Dinas PMPTSP pada tahun 2017. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas PMPTSP tahun 2017, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2017 pada Dinas PMPTSP Provisi Jawa Barat telah membuahkan hasil pembangunan. Dari dua indikator kinerja utama, keduanya telah memenuhi kriteria yang sangat tinggi. Kinerja yang tercermin dari capaian atas sejumlah *outcome* yang masuk kategori sangat tinggi tersebut, tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus, dan berkelanjutan. Keterpaduan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi koordinasi yang efektif dan efisien.

Namun disadari, masih terdapat indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKIP Dinas PMPTSP Tahun 2017 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Bandung, Januari 2018  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Jawa Barat,



**Dr. Ir. H. DADANG MOHAMAD, MSCE.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601217 198511 1 002

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKIP Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat tahun 2017 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomer 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas PMPTSP Provinis Jawa Barat.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas PMPTSP yang telah dicanangkan pada tahun 2017 telah berhasil dicapai.

Dari dua indikator kinerja utama Dinas PMPTSP Tahun 2017, menunjukkan bahwa capaian pada keduanya sudah masuk pada kategori sangat tinggi. Pencapaian IKU dengan kategori sangat tinggi yaitu indikator yang pencapaiannya  $\geq 91\%$  yaitu pada sasaran strategis meningkatnya realisasi PMA dan PMDN di Jawa Barat dengan indikator kinerja jumlah nilai investasi di Jawa Barat dimana pencapaiannya mencapai 117,2% serta pada sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dengan

indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dengan pencapaian sebesar 97,1 %.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas PMPTSP ke depan

*Pertama*, walaupun satu IKU Dinas PMPTSP telah mencapai target yang sangat baik yaitu jumlah realisasi investasi PMA & PMDN di Jawa Barat, namun belum tersebarnya investasi di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat menjadi hal perlu diperhatikan. Penyusunan profil peluang investasi dengan lebih banyak menggali potensi dan peluang investasi di wilayah Jawa Barat bagian selatan serta fokus pada sektor pertanian dan perkebunan diharapkan menjadi solusi agar investasi lebih tersebar merata ke seluruh wilayah Jawa Barat.

*Kedua*, lebih ditingkatkan lagi pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat sehingga kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan LKPM meningkat, selain itu perlu lebih ditingkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap proyek investasi sehingga nilai realisasi investasi di Jawa Barat akan meningkat.

*Ketiga*, perlu segera dibangun gedung baru Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat karena hal ini akan sangat menunjang terhadap perbaikan pelayanan yang diberikan Dinas PMPTSP kepada pemohon izin walaupun sudah dikembangkan sistem pelayanan perizinan secara online namun masyarakat masih banyak yang mengajukan perizinan secara langsung.

*Keempat*, masih lemahnya koordinasi Dinas PMPTSP dengan Kabupaten/Kota dan OPD/Dinas Teknis, hal ini juga bisa diartikan pentingnya koordinasi dan sinergi antara Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat dengan berbagai unsur baik Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat, maupun juga dengan OPD/Dinas Teknis terkait pelayanan perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

## B A B I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Penyusunan LKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.

Proses penyusunan LKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi

pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat.

LKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKIP tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Organisasi selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

## 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PMPTSP

Dalam menyelenggarakan fasilitasi dan informasi kebijakan penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan perizinan

terpadu, Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, meliputi :

#### **A. Tugas Pokok**

Melaksanakan urusan Daerah pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, meliputi pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan system informasi penanaman modal, serta pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **B. Fungsi**

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
2. penyelenggaraan pengelolaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. penyelenggaraan administrasi Dinas.
4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
5. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **1.4 Isu Strategis Dinas PMPTSP**

Isu Strategis yang dihadapi Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam Rencana Kerja tahun 2017 adalah :

1. Data profil peluang investasi belum *up to date*.



2. Peningkatan kualitas pelaksanaan promosi investasi.
3. Belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang mendukung pelayanan publik sesuai SPP.
4. Belum terdapat SPM dalam pelaksanaan pelayanan publik.
5. SPP dan SOP belum *up to date*.
6. Belum semua data base penanaman modal dan perizinan terintegrasi dengan OPD terkait.
7. Tim Taskforce Penanganan Permasalahan Penanaman Modal dan Tim teknis dari OPD terkait belum berfungsi secara Optimal.
8. Konektifitas jaringan dengan OPD teknis belum berfungsi.
9. Masih lemahnya koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan stakeholder.
10. Kurangnya kesadaran investor untuk melaporkan perkembangan usahanya.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan LKIP Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut.

#### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Menguraikan tentang tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, serta sejauhmana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Pada bagian ini juga diuraikan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mengatasi atau mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi, Isu Strategis serta Sistematika penyusunan LKIP.

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Menguraikan tentang Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, cara mencapai Tujuan dan Sasaran, serta

Penetapan Kinerja Tahun 2017 yang menjadi acuan pengukuran kinerja.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Menguraikan tentang Pengukuran Kinerja, Kinerja sasaran Strategis, Evaluasi dan Analisis hasil pengukuran Kinerja Strategis. Dalam bab ini juga diuraikan mengenai pencapaian sasaran-sasaran dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat.

### **BAB IV PENUTUP**

Mengemukakan tinjauan secara umum dengan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan, permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat serta strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya.

## B A B II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Jawa Barat

##### 2.1.1 Visi dan Misi

Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMPTSP merupakan kerangka pelaksanaan kegiatan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi dan program, Renstra Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat serta memperhatikan baik RPJP maupun RPJM Nasional. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Kepala Dinas PMPTSP yang tertuang dalam Renstra tersebut.

Visi :

**“Unggul Mendorong Investasi dan Profesional Melayani Publik “**

Visi tersebut menunjukkan bahwa Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat harus bekerja secara profesional dengan kinerja terbaik yang berdampak pada keunggulan Provinsi Jawa Barat sebagai daerah tujuan investasi di Indonesia, keunggulan tersebut baik dalam bidang promosi investasi, realisasi investasi, fasilitasi penanaman modal serta dalam system informasi.

Visi tersebut menunjukkan bahwa kinerja profesional Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat akan memberikan dampak jangka panjang yaitu mewujudkan Jawa Barat sebagai daerah tujuan investasi terbaik di Indonesia bagi para investor

Misi :

1. Meningkatkan realisasi investasi di Jawa Barat.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan

### 2.1.2 Tujuan

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Misi Meningkatkan realisasi investasi di Jawa Barat, dengan tujuan :
  - a. Meningkatkan realisasi investasi PMA dan PMDN di Jawa Barat
2. Misi Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, dengan tujuan :
  - a. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berdasarkan asas-asas pelayanan publik.

### 2.1.3 Sasaran

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Misi Meningkatkan realisasi investasi di Jawa Barat, dengan sasaran :
  - a. Meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN di Jawa Barat
2. Misi Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, dengan sasaran :
  - a. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan

Tabel 2.1  
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Akhir 2018
1	Meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN di Jawa Barat	Jumlah nilai investasi di Jawa Barat	Rp. Trilyun	95,81	154
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	77,06	81

#### 2.1.4 Strategi

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, kebijakan, dan program. Selain itu, untuk mengukur capaian kinerja, maka dirumuskan pula indikator sebagai tolok ukur kinerja.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai misi, adalah sebagai berikut :

1. Strategi untuk mencapai misi Meningkatkan realisasi investasi di Jawa Barat, yaitu :
  - a. Mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal dengan melibatkan seluruh stake holder
  - b. Memberikan kemudahan berinvestasi di Jawa Barat dengan meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan bagi calon investor (*Ease of Doing Business*)
  - c. Meningkatkan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi yang lebih efisien dan efektif guna mendorong pesebaran investasi di Kabupaten /Kota dengan mempertimbangkan karakter dan kondisi geografis daerah

- d. Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor dengan melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi penanganan permasalahan investasi bagi perusahaan PMA/PMDN
2. Strategi untuk mencapai misi Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, yaitu :
    - a. Membuat regulasi teknis pelaksanaan pelayanan perizinan terutama pengelolaan izin-izin strategis untuk mempercepat proses layanan dan akurasi pengendalian sektoral
    - b. Menerapkan pola *online system* dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat untuk mendorong penanam modal mengajukan perizinan secara *online*
    - c. Meningkatkan kapasitas aparatur PTSP dalam melayani masyarakat sebagai upaya pendorong penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia Dinas PMPTSP
    - d. Meningkatkan sinergitas dengan Perangkat Daerah teknis sehingga dapat meningkatkan kepastian waktu dan kredibilitas layanan perizinan.

#### 2.1.5 Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai misi, adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan untuk mencapai misi Meningkatkan realisasi investasi di Jawa Barat, yaitu :
  - a. Mengoptimalkan fungsi pemusatan database potensi investasi, pengolahan informasi peluang investasi, sebagai alat perencana, pelayanan, pengendalian dan pembinaan dalam meningkatkan realisasi investasi di Jawa Barat
  - b. Menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan dengan pusat dan daerah lainnya serta menyusun rekomendasi penghapusan peraturan perundang-undangan di pusat maupun daerah yang menghambat investasi

- c. Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi, dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Jawa Barat melalui berbagai media.
  - d. Melaksanakan evaluasi dan *monitoring*, inventarisasi, identifikasi, dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal, serta memperjelas Tupoksi dari Tim *Taskforce* Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal
2. Kebijakan untuk mencapai misi Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, yaitu :
- a. Melaksanakan penyederhanaan, standarisasi prosedur, dan pengembangan proses perizinan secara paralel untuk mempercepat proses perizinan
  - b. Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat, serta integrasi sistema pelayanan perizinan
  - c. Pemenuhan Sumber Daya Aparatur sesuai dengan standar kompetensi dan peningkatan kapasitas melalui diklat, seminar, *workshop*, bimbingan teknis dan lokakarya didukung oleh Perangkat Daerah terkait;
  - d. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, serta Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari unsur-unsur Pejabat Perangkat Daerah terkait.

#### **2.1.6 Program untuk Pencapaian Sasaran**

Berdasarkan visi, misi tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian di jabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program Dinas PMPTSP. Adapun program program yang dilaksanakan untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017

No	Sasaran	Didukung jumlah Program
1	Meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN di Jawa Barat	1 program
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	4 program

## 2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2017

Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan Penetapan Kinerja 2017 dilakukan dengan mengacu kepada Renstra, Renja 2017, IKU dan APBD. Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Penetapan Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.3

Penetapan Kinerja BPMPT Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN di Jawa Barat	Jumlah nilai investasi di Jawa Barat	Rp. Trilyun	121,8
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	80

### 2.2.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Pada Tahun Anggaran 2017 BPMPT Provinsi Jawa Barat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 38.175.394.315,00, yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas PMPTSP pada Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.4

## Anggaran Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

No.	Uraian	Anggaran	%
1	Belanja Tidak Langsung	18.750.379.315,00	49,1
2	Belanja Langsung	19.425.015.000,00	50,9
	Jumlah	38.175.394.315,00	100

Alokasi anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

## Alokasi per Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1	Meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN di Jawa Barat	Jumlah nilai investasi di Jawa Barat	3.473.500.000,00	17,9
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	7.544.320.000,00	38,8
	Total Belanja Langsung		19.425.015.000,00	100 %

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp. 19.425.015.000,00 dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dengan besaran 38,8% sementara untuk sasaran Meningkatkan realisasi investasi PMA dan PMDN di Jawa Barat sebesar 17,9% dari total anggaran belanja langsung, sementara anggaran belanja lainnya dialokasikan untuk program dan kegiatan pada sasaran lain diluar perjanjian kinerja tahun 2017.

### B A B III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai bagian dari komitmen DPMPTSP Provinsi Jawa Barat untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan web-monev adalah bagian kunci untuk mendorong pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri No. 54 Tahun 2010, diolah

### 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja DPMPTSP Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2017. Pencapaian IKU DPMPTSP Provinsi Jawa Barat tahun 2017 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.2  
Tabel Pencapaian IKU DPMPTSP Tahun 2017

No	Indikator	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2018)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018 %
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Jumlah nilai investasi di Jawa Barat	Rp. 143,04 Trilyun	Rp. 138,85 Trilyun	Rp. 162,72 Trilyun	117,2 %	Rp. 154 Trilyun	105,7 %
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,94	80	77,67	97,1 %	81	95,9 %

Dari 2 indikator kinerja sasaran yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) DPMPTSP Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2017, 1 indikator menunjukkan capaian 100 % atau lebih. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan pencapaian indikator kinerja dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian indikator tersebut. Untuk target indikator kinerja IKU lainnya yang tingkat pencapaiannya belum 100% pada tahun 2017, masih diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus, dan terarah; dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 menunjukkan bahwa indikator kinerja sasaran strategis menunjukkan pencapaian yang sangat tinggi.

Sementara bila dilihat dalam kerangka triwulan, perbandingan antara rencana dan realisasi kinerja untuk seluruh sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3  
Realisasi dan Capaian Kinerja IKU DPMPTSP  
Tahun 2017 per Triwulan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Prosentase
1	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Jumlah nilai investasi di Jawa Barat	Rp. Trilyun	138,85	Triwulan I	35,0	39,38	112,5
					Triwulan II	70,0	74,14	105,9
					Triwulan III	105,0	117	111,4
					Triwulan IV	138,85	162,72	117,2
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	80	Triwulan I	78	76,44	95,6
					Triwulan II	78	76,44	95,6
					Triwulan III	80	77,67	97,1
					Triwulan IV	80	77,67	97,1

Pencapaian kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan target kinerjanya, Target RPJMD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018, ditunjukkan tabel berikut ini :

Tabel 3.4  
Kinerja dan Realisasi IKU Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Tahun 2018	
				Target 2017	Capaian 2017	Realisasi	Target (Renstra)	PK
1	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Jumlah nilai investasi di Jawa Barat	Rp. Trilyun	138,85	162,72	117,2 %	138,85	138,85
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	80	77,67	97,1 %	80	80

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis :

1. Sasaran Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Penanaman modal baik itu Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) bermanfaat untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Terkait dengan sasaran di atas, pencapaian indikator kinerja jumlah realisasi investasi PMA dan PMDN di Jawa Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal

No.	Indikator	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2018)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Jumlah nilai investasi di Jawa Barat	Rp. 143,04 Trilyun	Rp. 138,85 Trilyun	Rp. 162,72 Trilyun	117,2	Rp. 154,0 Trilyun	105,7

Sasaran strategis meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan indikator kinerja jumlah nilai investasi di Jawa Barat dari target sebesar Rp. 138,85 Trilyun dapat terealisasi sebesar Rp. 162,72 Trilyun sehingga realisasi pencapaian targetnya sebesar 117,2%. Jika dibandingkan dengan realisasi investasi PMA dan PMDN di Jawa Barat Tahun 2016 juga mengalami peningkatan sebesar 13,75% yaitu dari realisasi sebesar Rp. 143,04 Trilyun pada Tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 162,72 Trilyun pada Tahun 2017.

Tabel 3.6

Realisasi Investasi berdasarkan Jumlah Proyek, Investasi PMA/PMDN dan Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2017

NO	JENIS INFORMASI	TAHUN		LAJU PERTUMBUHAN (%)
		2016	2017	
1.	Jumlah Total Proyek (buah)	38.057	36.791	-3,33
	a. PMA (buah)	5.923	7.151	20,73
	b. PMDN (buah)	32.134	29.640	-7,76
2.	Jumlah Total Investasi PMA dan PMDN (Rp)	143,04 Trilyun	162,72 Trilyun	13,76
	a. PMA (Rp)	74,99 Trilyun	68,66 Trilyun	-8,44
	b. PMDN (Rp)	68,05 Trilyun	94,05 Trilyun	38,21
3.	Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)	479.751	297.786	-37,93
	a. PMA (orang)	295.039	138.921	-52,91
	b. PMDN (orang)	184.712	158.865	-13,99

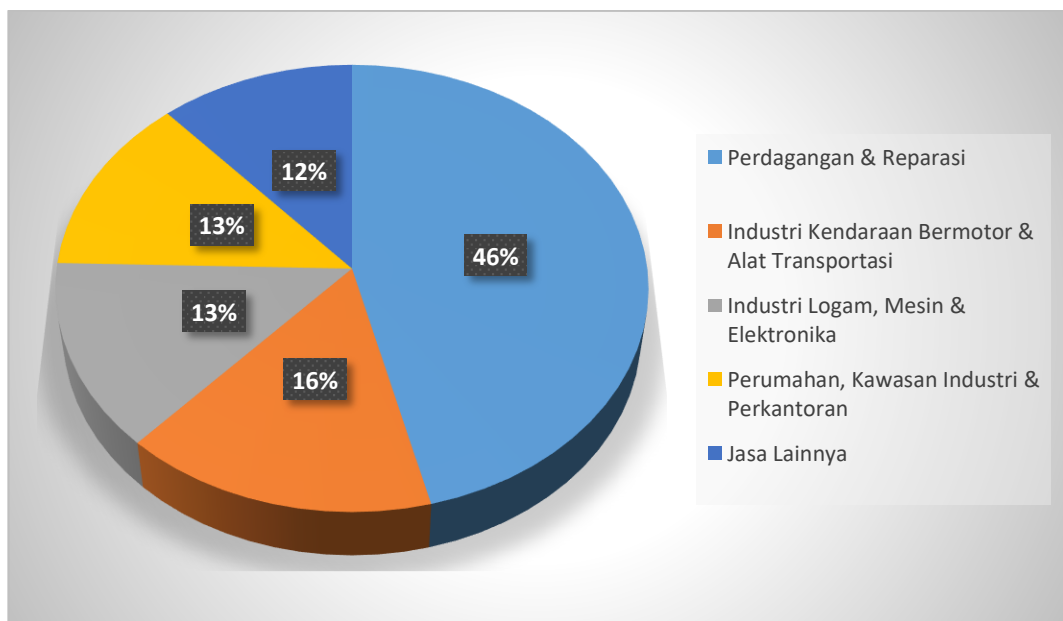
Sumber : Bidang Data dan Informasi Dinas PMPTSP Prov. Jabar Tahun 2017  
(data berdasarkan LKPM dan Non LKPM)

Jumlah proyek (lapangan usaha) PMA/PMDN tahun 2017 sebanyak 36.791 proyek/usaha. Terjadi penurunan jumlah proyek baik PMA maupun PMDN sebesar 3,33% dibandingkan dengan jumlah proyek pada tahun 2016 sebanyak 38.057 proyek/usaha. Untuk serapan tenaga kerja tahun 2017 sebanyak 297.786 orang, dimana jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 37,93% dibanding tahun 2016 sebanyak 479.751 orang.

Berdasarkan rumpun sektor lapangan usaha yang berkontribusi terhadap realisasi investasi PMA dan PMDN di Jawa Barat tahun 2017 meliputi 24 sektor usaha, dengan 5 sektor yang merupakan peringkat 5 (lima) besar diantaranya: sektor perdagangan & reparasi dengan nilai investasi Rp. 45,65 Trilyun; sektor Industri kendaraan bermotor & alat transportasi lain dengan nilai investasi Rp. 15,68 Trilyun; sektor Industri Logam, Mesin & Elektronika dengan nilai investasi Rp. 13,40 Trilyun; sektor Perumahan, kawasan industri dan perkantoran dengan nilai investasi Rp. 12,86 Trilyun dan sektor jasa lainnya dengan nilai investasi Rp. 11,51 Trilyun Secara rinci dapat terlihat pada gambar berikut.

Gambar 3.1

## Investasi Berdasarkan Rumpun Sektor Usaha



Jika realisasi investasi dilihat berdasarkan lokasi, realisasi investasi terbesar terdapat di Kabupaten Bekasi dengan rasio sebesar 21% dari total nilai realisasi investasi di Jawa Barat disusul dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, Kota Bandung dan Kota Bogor. Sebaran investasi berdasarkan lokasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

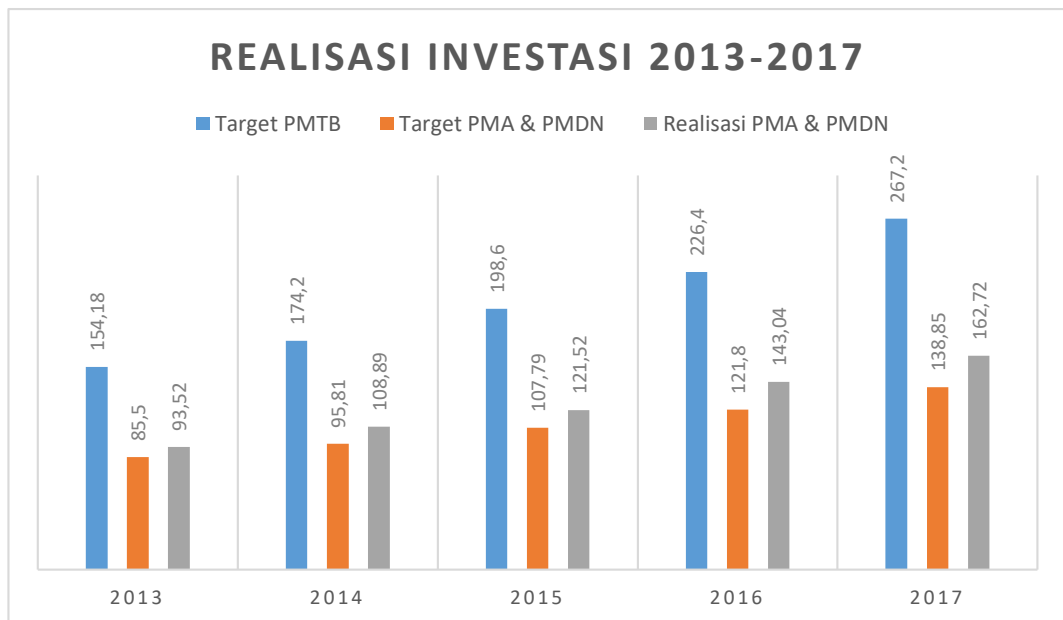
Tabel 3.7  
Realisasi Investasi Berdasarkan Lokasi

No.	KAB./KOTA	Jumlah LKPM	Tenaga Kerja (orang)	Jumlah Investasi (Rp.)	Rasio (%)
1	Kab Bekasi	7.725	107.487	49.198.202.532.276	30,24
2	Kab Karawang	2.887	40.393	30.676.651.945.264	18,85
3	Kab Bogor	3.261	20.942	9.223.482.322.116	5,67
4	Kota Bandung	2.134	3.054	9.123.680.545.473	5,61
5	Kota Bogor	1.245	7.238	8.299.623.621.503	5,10
6	Kab Cirebon	1.596	17.015	6.186.169.188.296	3,80
7	Kota Tasikmalaya	448	4.229	6.175.059.021.192	3,80
8	Kota Bekasi	2.627	3.782	5.626.494.984.560	3,46
9	Kab Sumedang	545	17.231	5.053.884.371.308	3,11
10	Kab Purwakarta	834	4.296	4.208.639.515.755	2,59
11	Kab. Pangandaran	627	1.550	3.904.423.800.000	2,40
12	Kab Majalengka	457	4.737	3.710.509.491.833	2,28
13	Kab Bandung	1.692	15.377	3.411.474.727.776	2,10
14	Kab Bandung Barat	917	11.211	3.381.689.161.486	2,08
15	Kota Depok	1.628	3.511	3.059.775.110.851	1,88
16	Kab Garut	864	3.663	2.176.540.900.365	1,34
17	Kota Cimahi	336	9.264	1.662.658.061.607	1,02
18	Kab Subang	1.363	2.488	1.531.452.309.905	0,94
19	Kab Cianjur	1.464	957	1.291.237.089.033	0,79
20	Kab Tasikmalaya	523	3.957	1.262.907.934.667	0,78
21	Kota Cirebon	339	147	847.835.221.161	0,52
22	Kab Sukabumi	872	8.873	773.086.815.775	0,48
23	Kab Ciamis	520	1.819	771.516.706.078	0,47
24	Kab Indramayu	890	84	532.418.916.155	0,33
25	Kab Kuningan	403	1.685	422.440.450.017	0,26
26	Kota Sukabumi	455	2.446	171.685.161.887	0,11
27	Kota Banjar	139	350	31.963.286.000	0,02
	<b>Total</b>	<b>36.791</b>	<b>297.786</b>	<b>162.715.503.192.340</b>	<b>100</b>



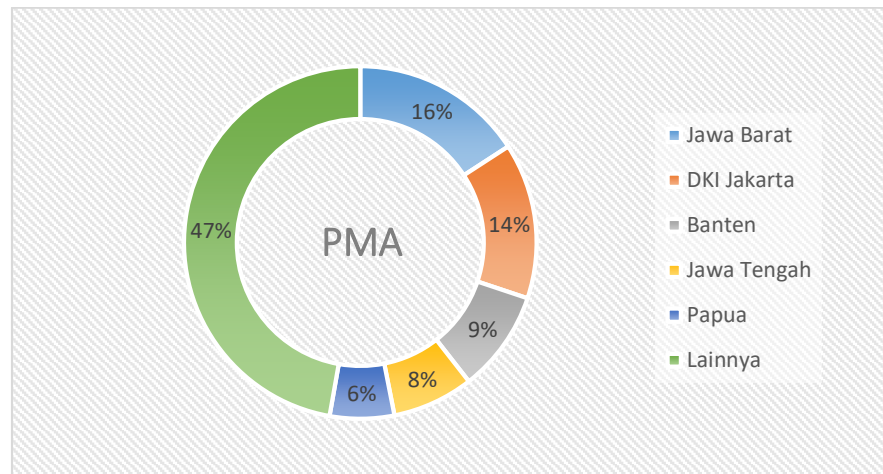
Realisasi investasi PMA dan PMDN di Jawa Barat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 juga menunjukkan peningkatan, hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.2



Berdasarkan data BKPM RI, pada tahun 2017 nilai realisasi investasi PMA di Jawa Barat mencapai US\$ 5,1 juta. Angka ini lebih tinggi dari nilai realisasi investasi PMA di DKI Jakarta sebesar US\$ 4,6 juta, diikuti Banten sebesar US\$ 3 juta, Jawa Tengah sebesar US\$ 2,4 juta serta Papua sebesar US\$ 1,9 juta. Dari total realisasi investasi PMA Tahun 2017 di Indonesia yang mencapai US\$ 32,2 juta, kontribusi Jawa Barat merupakan yang terbesar dengan rasio 16%. Realisasi investasi PMA Tahun 2017 berdasarkan lokasi di Indonesia dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

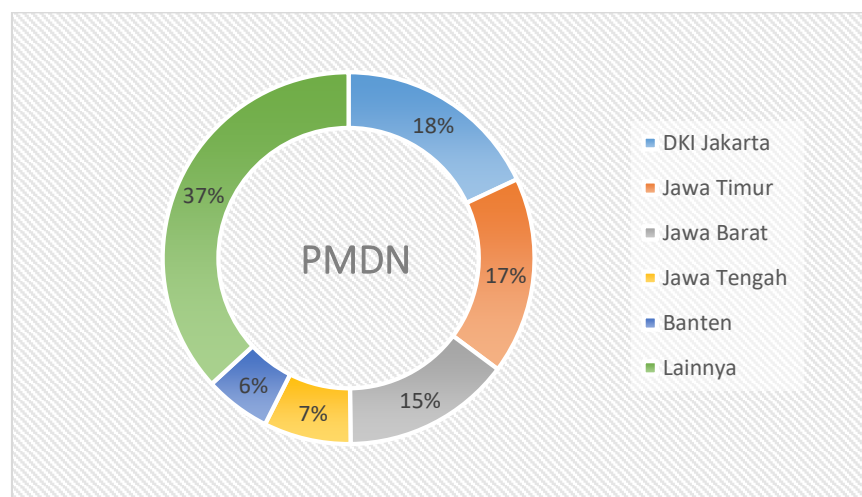
Gambar 3.3  
 Realisasi Investasi PMA Tahun 2017 berdasarkan Lokasi



Sumber : BKPM RI Tahun 2018 (berdasarkan LKPM)

Sedangkan realisasi investasi PMDN di Jawa Barat berdasarkan data BKPM RI tahun 2017 adalah sebesar Rp. 38,4 Trilyun, berada di bawah DKI Jakarta sebesar Rp. 47,3 Trilyun, dan Jawa Timur sebesar Rp. 45 Trilyun, namun masih berada di atas Jawa Tengah sebesar Rp. 19,9 Trilyun, dan Banten sebesar Rp. 15,1 Trilyun. Berdasarkan data BKPM RI realisasi investasi PMDN Tahun 2017 di Indonesia berdasarkan lokasi dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

Gambar 3.4  
 Realisasi Investasi PMDN Tahun 2017 berdasarkan Lokasi



Sumber : BKPM RI Tahun 2018 (berdasarkan LKPM)

Beberapa alasan yang menyebabkan realisasi investasi PMA dan PMDN di Jawa Barat dapat meningkat terus setiap tahun dan melampaui target yang telah ditetapkan diantaranya: selain lokasi Jawa Barat yang strategis sebagai penyangga DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia, Jawa Barat juga memiliki jumlah dan luas kawasan industri yang paling besar di Indonesia, yaitu dengan jumlah kawasan industri sebanyak 13 buah kawasan industri dengan luas kurang lebih 11.881 Ha (39,55% dari luas seluruh kawasan industri di Indonesia) sehingga investor tertarik untuk menanamkan modalnya di Jawa Barat karena banyaknya kemudahan yang didapat jika berinvestasi di kawasan industri. Dari 13 buah kawasan industri di Jawa Barat telah masuk ke dalam program KLIK dari BKPM. KLIK (Kawasan Industri Langsung Konstruksi) adalah fasilitas kemudahan yang diberikan BKPM, KLIK sejatinya adalah sebuah fasilitas dimana investor bisa terus melangsungkan persiapan usahanya berupa pembangunan konstruksi begitu mendapatkan izin prinsip meski belum memiliki izin lain seperti Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lingkungan-amdal, UKL/UPL, dan berbagai izin pelaksanaan daerah. Dengan catatan, selama memulai konstruksi, investor diwajibkan tetap mengurus izin-izin tersebut. Izin-izin yang belum dimiliki tersebut wajib diselesaikan sebelum seluruh pembangunan konstruksi untuk kegiatan berproduksi selesai. Setelah izin dan konstruksi selesai,

pihak investor baru diperbolehkan untuk melakukan kegiatan produksi dan mulai berbisnis

Selain itu keberhasilan ini juga ditunjang dengan kebijakan yang mendukung terhadap peningkatan realisasi penanaman modal diantaranya adalah: Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat.

Peningkatan realisasi investasi juga ditunjang oleh kegiatan promosi investasi yang efektif yaitu dengan melaksanakan promosi investasi secara terpadu oleh Provinsi Jawa Barat dengan 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah, dan inovatif, ketersediaan informasi tentang potensi dan peluang investasi yang informatif bagi para investor dan calon investor, pameran dilaksanakan secara spesifik ditujukan kepada segmen/sasaran yang dituju baik untuk promosi investasi luar negeri maupun dalam negeri.

Hal lain yang mendukung tercapainya target realisasi investasi adalah terlaksananya kerjasama antar daerah yang efektif melalui pembuatan kesepakatan kerjasama (MoU) dengan Provinsi lain di Indonesia dalam bidang penanaman modal, kerja sama antar daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, fasilitasi

terwujudnya kerjasama strategis antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil menengah.

Target realisasi investasi tahun 2017 juga tercapai karena adanya kemudahan dalam penanaman modal dalam bentuk: berbagai kemudahan pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal, pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah, kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor, penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, penyediaan sarana dan prasarana.

Tercapainya realisasi investasi pada tahun 2017 juga ditunjang dengan pelaksanaan kegiatan pada bidang pengendalian yang berjalan dengan baik yang antara melaksanakan kegiatan: pembinaan ketentuan pelaksanaan penanaman modal bagi perusahaan PMA/PMDN, pemantauan pelaksanaan penanaman modal khususnya bagi proyek penanaman modal yang masih dalam tahap konstruksi sampai dengan produksi, pengawasan ketentuan pelaksanaan penanaman modal bagi perusahaan PMA/PMDN, fasilitasi pemecahan permasalahan pelaksanaan penanaman modal bagi perusahaan PMA/PMDN yang memiliki hambatan maupun masalah dalam merealisasikan penanaman modalnya, helpdesk/konsultasi tata cara dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal secara per perusahaan baik bagi para

penanaman modal maupun aparaturnya Kabupaten/Kota, koordinasi tim pendataan dengan Kabupaten/Kota khususnya unit yang melaksanakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Pada tahun 2017 realisasi investasi PMA mengalami penurunan sebesar 8,6%, namun realisasi investasi PMA di Jawa Barat masih yang tertinggi di Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya, dengan kontribusi sebesar 15,8% terhadap realisasi investasi PMA di seluruh Indonesia.

Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, proporsi investasi selalu didominasi oleh realisasi investasi PMA, namun proporsinya semakin lama semakin berkurang, dimana pada tahun 2017 proporsi realisasi investasi didominasi oleh realisasi PMDN dengan proporsi sebesar 52%, dengan demikian dapat dikatakan bahwa selama lima tahun terjadi penguatan realisasi investasi PMDN. Secara umum realisasi investasi Jawa Barat telah berhasil melampaui target yang ditetapkan.

**Permasalahan :**

1. Belum tersebarnya investasi ke seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Investasi masih terkonsentrasi di Jawa Barat bagian Utara;
2. Sektor/lapangan usaha yang diminati investor untuk menanamkan usahanya berada pada sektor sekunder dan tersier, masih minim minat investor untuk menanamkan usahanya pada sektor primer misalnya di sektor pertanian dan perkebunan;

3. Masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), hanya kurang lebih 10 % perusahaan (600 perusahaan) yang menyampaikan LKPM secara rutin;
4. Penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat masih belum optimal disebabkan ada beberapa permasalahan yang tidak dapat diselesaikan disebabkan tidak adanya kewenangan Tim Task Force untuk menyelesaikan masalah tersebut.

**Solusi :**

1. Penyusunan dokumen profil peluang investasi sampai dengan tahap Feasibility Study (FS) dan diusahakan memakai konsultan yang sudah kredibel di mata investor luar negeri, sehingga profil peluang investasi tersebut sudah layak untuk dijual kepada investor, terutama investor dari luar negeri
2. Penyusunan dokumen profil peluang investasi yang menampilkan peluang investasi dari Kabupaten/Kota di Jawa Barat bagian selatan sehingga diharapkan Jawa Barat bagian selatan juga akan menarik minat investor untuk menanamkan investasinya
3. Pembuatan profil peluang investasi lebih diutamakan pada sektor tersier, misalnya sektor pertanian dan perkebunan sehingga minat investor pada kedua sektor tersebut akan meningkat

4. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN tentang pentingnya menyampaikan laporan LKPM. Juga perlu diwacanakan adanya reward bagi perusahaan yang rutin menyampaikan LKPM setiap triwulan
5. Lebih meningkatkan koordinasi Tim Task Force terutama dengan Instansi seperti BPN, Bea Cukai, Pajak dan PLN karena permasalahan yang menyangkut hal itu susah untuk dicarikan solusinya.

## **2. Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan**

Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan.

Pemberian layanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan implikasi dan fungsi aparat Negara sebagai pelayan masyarakat, sehingga kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum sangat strategis karena akan menentukan sejauhmana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat dan sejauhmana negara telah menjalankan peranannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.

Memperhatikan pentingnya pelayanan publik perlu adanya upaya melakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu upaya pengukuran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional



(PROPENAS), perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan.

Terkait dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perijinan, pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6

Rencana dan realisasi capaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perijinan

No.	Indikator	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2018)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,4	80	77,67	97,1	81	95,9 %

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat yang merupakan salah satu institusi pelayanan tentunya berkewajiban untuk melakukan penilaian kepuasan pelanggannya. Tingkat kepuasan pelanggan ini dapat digunakan sebagai bahan masukan, evaluasi dan perumusan kebijakan lebih lanjut untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan. Pada tahun 2017, telah dilakukan pengukuran kepuasan pelanggan terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan pada DPMPSTSP Provinsi Jawa Barat sebanyak 1 (satu) kali. Pengukuran kepuasan dilaksanakan melalui metode survey wawancara terhadap para pemohon perizinan di DPMPSTSP, baik permohonan di 3 gerai layanan perizinan maupun di gerai pusat di Bandung. Adapun indikator dan unit variabel pertanyaan kuesioner dalam survey ini mengacu kepada standar penyusunan **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik. Terdapat 10 unsur yang dinilai di dalam survey ini yang meliputi :

- U.1. Kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanan ;
- U.2. Kemudahan prosedur dalam mendapatkan pelayanan perizinan ;
- U.3. Kesesuaian antara standar waktu yang ditetapkan secara tertulis dengan waktu penyelesaian perizinan ;
- U.4. Kewajaran biaya/tarif pelayanan ;
- U.5. Kesesuaian hasil pelayanan yang diterima dengan ketentuan yang telah ditetapkan ;
- U.6. Kompetensi/kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan ;
- U.7. Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan;
- U.8. Ketersediaan dan penanganan pengaduan pengguna layanan ;
- U.9. Ketersediaan dan efektifitas peralatan yang digunakan dalam memberikan kenyamanan dan kemudahan proses pelayanan ;
- U.10. Kondisi bangunan dan lingkungan gerai dalam memberikan rasa aman selama proses pelayanan ;

**Tabel 3.7**  
**Nilai Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat**  
**Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2017**

No.	Unsur pelayanan	Nilai Total	Rata-rata Terbobot	Kinerja unit pelayanan
<b>U1</b>	Kesesuaian persyaratan	3,07	0,31	Baik
<b>U2</b>	Kemudahan prosedur	3,00	0,30	Baik
<b>U3</b>	Kesesuaian waktu	2,588	0,26	Baik
<b>U4</b>	Kewajaran biaya/tarif	3.62	0,36	Baik
<b>U5</b>	Kesesuaian hasil pelayanan	3,08	0,31	Baik
<b>U6</b>	Kompetensi/kemampuan petugas	3,11	0,31	Baik
<b>U7</b>	Kesopanan dan keramahan petugas	3,28	0,33	Baik

<b>U8</b>	Ketersediaan dan penanganan pengaduan	2,84	0,28	Baik
<b>U9</b>	Ketersediaan dan efektifitas peralatan yang digunakan	3,21	0,32	Baik
<b>U10</b>	Kondisi bangunan dan lingkungan	3,26	0,33	Baik
<b>Nilai Indeks Pelayanan</b>			<b>3,11</b>	
			<b>Nilai IKM</b>	<b>77,67</b>
			<b>Nilai Mutu Pelayanan</b>	<b>B</b>
			<b>Kategori Kinerja Pelayanan</b>	<b>Baik</b>

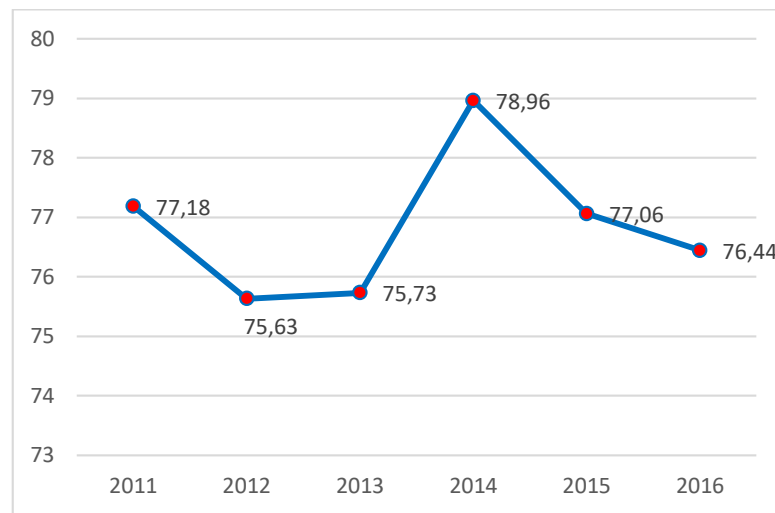
Sumber : Diolah Bidang Datin Dinas PMPT Prov. Jawa Barat, 2017

Berdasarkan penilaian dari 10 unsur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perizinan pada Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 diperoleh nilai 77,67 dengan kategori kinerja pelayanan “Baik”, artinya bahwa masyarakat pemohon perizinan menilai bahwa pelayanan yang diberikan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat adalah **BAIK**.

Memperhatikan data IKM sebelum tahun 2017, nampak nilai IKM Tahun 2017 ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016, sedangkan pada saat dibandingkan dengan tahun 2011 hingga tahun 2013 nampak kenaikan. Terjadinya penurunan bila dibandingkan tahun 2014, karena adanya faktor transisi perubahan lokasi yang semula berlokasi di Jl. PHHMustofa, sekarang beralih ke lokasi baru di Jl. Sumatera. Selain itu terjadi pula perubahan berbagai aturan yang sifatnya substantif bidang pelayanan sehingga proses kebijakan yang baru belum seutuhnya tersosialisasikan, misalnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebabkan beralihnya kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sehingga belum begitu siap untuk dilaksanakan.

Selain itu adanya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dalam penentuan akhir izin yang berkaitan dengan tata ruang juga menyebabkan lambatnya proses perizinan yang berkaitan dengan tata ruang misalnya izin pertambangan dan rekomendasi Kawasan Bandung Utara (KBU), hal ini disebabkan

untuk keluarnya izin dan non izin yang berkaitan dengan tata ruang harus melalui rapat pleno BKPRD yang terdiri dari beberapa unsur yang mengakibatkan sulitnya pelaksanaan rapat pleno dimaksud. Hal ini berdampak pada lambatnya keluarnya izin dan non izin yang berkaitan dengan tata ruang sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap DPMPTSP menjadi berkurang.



**Gambar 3.**  
**Perkembangan IKM DPMPTSP Jawa Barat tahun 2011 -2016**

Unsur pelayanan yang mencapai nilai IKM tertinggi adalah unsur **Kesopanan dan Keramahan Petugas**, sedangkan unsur dengan capaian nilai IKM terendah adalah **Kesesuaian antara standar waktu yang telah ditetapkan. Bidang Perindustrian dan Perdagangan** memiliki nilai IKM terbesar yaitu 79,81 dengan kategori **BAIK**. Bidang perhubungan yang memiliki pengaju terbanyak memberikan nilai IKM 76,25 dengan kategori Kurang Baik. Sedangkan tiga bidang perizinan dominan lainnya yaitu bidang PSDA memperoleh IKM sebesar 78,47, bidang Perikanan memperoleh IKM sebesar 77,29 dan bidang Kesehatan memperoleh nilai IKM sebesar 76,83. Secara umum seluruh bidang yang ditangani oleh Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat menunjukkan nilai kepuasan layanan dalam kategori **BAIK**.

Adapun untuk penilaian IKM terhadap kinerja Gerai Layanan Perizinan, Berdasarkan hasil pengukuran dapat diketahui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada setiap Gerai Layanan Perizinan. Capaian kinerja unsur pelayanan tertinggi diraih Gerai Bogor dengan Nilai IKM Unit Pelayanan 79,13 dengan kategori **BAIK**. Secara berturut-turut diikuti oleh Gerai Bandung (77,44) dengan kategori **BAIK**, Gerai Cirebon (76,79) dengan kategori **BAIK**, dan Gerai Garut (73,75) dengan kategori **KURANG BAIK**. Hasil survey IKM tahun 2017 menunjukkan kenaikan sebesar 1,17 dibandingkan dengan tahun 2016.

Menindaklanjuti hasil penilaian survey IKM tersebut, maka Dinas PMPTSP telah melakukan upaya peningkatan performansi petugas pelayanan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Perizinan dan peningkatan kinerja Tim Teknis untuk memenuhi target durasi penyelesaian permohonan perizinan. Serta tindaklanjut lainnya yang dijabarkan dalam rencana program dan kegiatan Dinas PMPTSP Tahun 2018.

Meskipun target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2017 tidak tercapai namun ada beberapa hal yang dapat dibanggakan dalam pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang menuntut dilakukannya pelayanan perizinan secara online, Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat juga telah melaksanakan pelayanan perizinan secara online dengan menggunakan aplikasi yang diberi nama “Simpatik” (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan untuk Publik). Sistem aplikasi ini telah diapresiasi oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan di rekomendasikan untuk direplikasi oleh Provinsi lain di Indonesia. Sesuai dengan MoU yang telah ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat dan KPK pada tanggal 23 Desember 2016 dan dilanjutkan dengan workshop aplikasi Simpatik bagi 17 Provinsi di Indonesia, sampai dengan akhir bulan Desember 2017 aplikasi Simpatik telah

direplikasi oleh 10 Provinsi dan telah secara resmi diluncurkan di daerah masing-masing.

Selain replikasi SIMPATIK, Dinas PMPTSP juga berkontribusi besar terhadap penghargaan yang diberikan Ombudsman Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk “Predikat Kepatuhan Tinggi” terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik atas 57 (lima puluh tujuh) produk layanan.

**Permasalahan :**

1. Sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia belum memenuhi standard pelayanan minimal, antara lain belum memiliki gedung kantor yang bernuansa layanan publik.
2. Tidak tersedianya lahan parkir yang memadai baik untuk pegawai ataupun untuk para pemohon.
3. Belum tersedianya ruangan khusus untuk informasi dan pengaduan. Saat ini yang ada adalah meja informasi dan pengaduan dengan kondisi yang sangat terbatas dan kurang memadai.
4. Ruangan Front Office (FO) belum memadai, dimana untuk loket pengajuan permohonan, loket pengambilan izin serta loket pembayaran retribusi (BJB) masih sangat terbatas serta ruang tunggu pemohon masih kurang memadai sehingga pemohon merasa kurang nyaman.
5. Belum tersedianya ruangan petugas pelayanan/back office yang dilengkapi pintu pengaman sehingga petugas dapat dengan nyaman dalam memproses perizinan tanpa ada gangguan
6. Masih adanya izin yang diproses oleh di Dinas/OPD teknis, sehingga pemohon sebelum ke BPMPT harus ke OPD terlebih dahulu

7. Masih ada beberapa urusan perizinan yang belum memiliki tenaga teknis di BPMPT, sehingga banyak persyaratan yang membutuhkan kajian yang lebih mendalam sulit untuk dikoordinasikan
8. Pendampingan lapangan belum berjalan dengan baik sehingga dalam mengeluarkan izin ada kepastian jenis izin dan persyaratan yang harus dipenuhi
9. Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi dengan OPD teknis belum berjalan dengan baik

**Solusi :**

1. Pembangunan gedung kantor baru DPMPSTSP Provinsi Jawa Barat sesuai dengan standar pelayanan publik.
2. Koordinasi lebih intens dengan Dinas/OPD teknis.
3. Mengusulkan kepada BKPD tenaga teknis di Dinas/OPD teknis sebagai pegawai BPMPT
4. Lebih meningkatkan koordinasi dengan Dinas/OPD teknis terkait.

### 3.3 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran Belanja Langsung pada tahun 2017 sebesar 94,18% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perijinan (93,59%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal (89,97%).

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya

yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2017 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang **sangat tinggi**. Hal ini bisa dilihat bahwa seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan namun realisasi capaian kinerjanya lebih besar dari yang ditargetkan.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9  
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

No	Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal	138,85 Trilyun	162,72 Trilyun	117,2%	3.473.500.000	3.125.016.848	89,97
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	80	77,67	97,1%	7.544.320.000	7.167.687.364	95,01

#### Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa terdapat satu sasaran, menunjukkan pencapaian kinerja yang sama atau lebih dari 100%, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas. Untuk sasaran meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal, telah mencapai kinerja sebanyak 117,2% namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 95,01% dari total anggaran yang dialokasikan.



Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.10  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ( $\geq 100\%$ )	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Jumlah nilai investasi di Jawa Barat	117,2%	89,97	10,03

## B A B IV

### PENUTUP

LKIP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKIP menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKIP bagi Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat, dalam masa-masa awal implementasi sebagai Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, LKIP juga menjadi bagian dari pertanggung-jawaban tugas dan fungsi Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat baik terhadap Gubernur maupun kepada seluruh masyarakat Jawa Barat.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2017), namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 adalah sangat baik, karena 2 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah,

khususnya dalam Renstra dan Renja 2017, yang mencakup juga penentuan program/ kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/ kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat ke depan.

*Pertama*, walaupun satu IKU BPMPT telah mencapai target yang sangat baik yaitu jumlah realisasi investasi PMA & PMDN di Jawa Barat, namun belum tersebarnya investasi di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat menjadi hal perlu diperhatikan. Penyusunan profil peluang investasi dengan lebih banyak menggali potensi dan peluang investasi di wilayah Jawa Barat bagian selatan serta fokus pada sektor pertanian dan perkebunan diharapkan menjadi solusi agar investasi lebih tersebar merata ke seluruh wilayah Jawa Barat.

*Kedua*, lebih ditingkatkan lagi pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat sehingga kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan LKPM meningkat, selain itu perlu lebih ditingkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap proyek investasi sehingga nilai realisasi investasi di Jawa Barat akan meningkat.

*Ketiga*, perlu segera dibangun gedung baru Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat karena hal ini akan sangat menunjang terhadap perbaikan pelayanan yang diberikan Dinas PMPTSP kepada pemohon izin walaupun sudah dikembangkan sistem pelayanan perizinan secara online namun masyarakat masih banyak yang mengajukan perizinan secara langsung.

*Keempat*, masih lemahnya koordinasi Dinas PMPTSP dengan Kabupaten/Kota dan OPD/Dinas Teknis hal ini juga bisa diartikan pentingnya koordinasi dan sinergi antara Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat dengan berbagai unsur baik Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat, maupun juga dengan OPD/Dinas Teknis.

*Kelima*, sebagai bagian dari perbaikan kinerja organisasi perangkat daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh bidang dan sekretariat di lingkungan

